

## **Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi**

**Mahardika Burhan**

Universitas Hasanuddin Makassar  
*mahardikaburhan@gmail.com*

**Kartini**

Universitas Hasanuddin Makassar  
*hanafikartini@fe.unhas.ac.id*

**Darwis Said**

Universitas Hasanuddin Makassar  
*darwissaid@yahoo.com*

### **Abstract**

*This study aims to examine and analyze the effect of financial independence and capital expenditure on financial performance with economic growth as the moderating variable. The population in this study is the district / city of South Sulawesi Province as many as 24 districts / cities with the observation year 2016 to 2020. This type of sample uses a saturated sample where the population is the sample. The data was processed using the panel data regression statistical test method. The results of this study indicate that: First, financial independence has a positive and significant effect on the financial performance of local governments. Second, capital expenditure has a significant positive effect on the financial performance of local governments. Third, economic growth strengthens in moderating self-reliance on regional financial performance. Fourth, economic growth strengthens capital expenditures on the government's financial performance in the districts/cities of South Sulawesi Province.*

**Keywords:** *Financial Independence, Capital Expenditure, Financial Performance, Economic Growth.*

### **A. PENDAHULUAN**

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Jika pencapaian sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka kinerja yang dilakukan dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Sedangkan, Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan suatu organisasi sangat penting untuk diukur. Analisis pengukuran kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya, salah satu

bentuknya adalah kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (*backbone*) penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja (Mahmudi, 2019). Agen bertindak tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal dan hal ini akan berpengaruh kepada kinerja organisasi.

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



Mengacu pada realisasi belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kenaikan belanja daerah di setiap tahun mulai dari tahun 2016 sebesar 6,9 Triliun sampai dengan di tahun 2020 sebesar 9,9 Terliun. dimana untuk mendanai pengeluaran yang ada, pemerintah daerah masih harus bergantung pada dana yang berasal dari pemerintah pusat sehingga menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat yang dapat dilihat dari aspek keuangan. Ketergantungan terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pemerintah pusat.

Dalam penelitian Mahardika dan Artini, (2014) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 memiliki kemandirian keuangan yang kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Suci dan Asmara, (2014) Penelitain tersebut dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2001 – 2011. Namun, penelitian dengan hasil yang berbeda dilakukan oleh Wardani dan Sutrisna, (2019) menjelaskan bahwa variable Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan

Ekonomi yang dilakukan pada 4 kawasan kota Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan pada tahun 2011 – 2016.

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) (2005) No. 58/2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Aset tetap dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Belanja modal meliputi antara lain adalah belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya Badrudin dkk. (2012)

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa belanja modal dapat ditingkatkan pemerintah daerah pada tahun 2016 sampai dengan 2018, namun di tahun 2019 mengalami penurunan persentase realisasi dan anggaran belanja modal yang sangat signifikan sebesar 41% dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 sebesar 43%. Walaupun Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian akan tetapi anggaran juga menjadi patokan apakah suatu bagian/ unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya, Dapat dilihat pada tahun 2019 hingga 2020 realisasi belanja modal mengalami penurunan yang menunjukkan menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kekayaan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan telah mengungkap beberapa determinan. Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa dkk.,(2016) semakin meningkatnya alokasi belanja modal maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah. Sari dkk., (2020:223) Mengatakan dalam penelitiannya bahwa belanja modal secara parsial berdampak secara relevan ke Kinerja Keuangan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan Sari dan Mustanda, (2019:4782), Mulyani dan Wibowo, (2017:65) dan Leki dkk., (2018:168) belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya belanja modal rendah maka rasio efisiensi yang dihasilkan tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Antari dan Sedana, (2018:1106) menemukan hasil yang berbeda bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bali, sejalan dengan penelitian Fernandes dan Putri, (2022:206), Darwanis dan Saputra, (2014:194), Nugroho dan Rohman, (2012:11) bahwa belanja modal berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Artinya bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan

pemerintah daerah tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi yang dapat bernilai positif dan bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif maka kegiatan ekonomi tersebut mengalami peningkatan, maupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi nasional yang dihitung melalui GDP (*Gross Domestic Product*) dapat juga dijadikan indikator atas laju perekonomian nasional yang dalam hal ini menyangkut efektifitas dari tingkat investasi dalam maupun luar negeri. Laju pertumbuhan ekonomi nasional mencerminkan produktivitas nasional dengan dana investasi dalam maksimalisasi total produksi dapat mendorong tingkat laju pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan variabel moderasi untuk melihat hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Holung dkk., (2021) perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini variabel kemandirian keuangan, belanja modal sebagai variabel independen dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen dengan pertumbuhan ekonomi sebagai moderasi sedangkan dalam penelitian sebelumnya belum menggunakan variabel moderasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen.

Mengacu pada realisasi belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anggarannya, dimana Pendapatan Asli daerah belum mampu untuk menutupi total belanja daerahnya dan Peningkatan belanja modal untuk pembangunan secara langsung akan meningkatkan anggaran belanja daerah. Belanja modal tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur, tetapi juga ditujukan untuk berbagai jasa yang terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Dengan begitu kemandirian daerah akan terwujud bila kemampuan keuangan atau sumber-sumber penerimaan dalam bentuk pendapatan asli daerah semakin membaik adapun daerah yang masih kekurangan akan diberikan bantuan berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat berbagai sumber potensial pendapatan asli daerah menjadi indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan dan kemandirian daerah itu sendiri. Melihat fenomena yang terjadi di atas peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi Studi pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan”.

## **B. METODE**

Penelitian dilakukan pada 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2016-2020 dengan jumlah observasi sebanyak 120 unit analisis (24 x 5 tahun). Metode

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling jenuh/ sensus terhadap seluruh populasi agar kesimpulan yang diambil dapat lebih menggambarkan karakteristik elemen populasi yang sebenarnya dan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan optimalisasi perencanaan anggaran di masa mendatang pada pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi di Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 24 kabupaten/kota untuk tahun 2016 sampai 2020. Pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh dimana semua populasi menjadi sampel yaitu berjumlah 120 sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan Sugiyono (2019). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2016-2020 yang berjumlah 24 Kabupaten/Kota.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif merupakan gambaran jawaban responden yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), simpangan baku (standard deviation) yang disajikan dalam tabel masing-masing variabel eksogen, moderasi, dan variabel endogen. Hasil analisis deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Statistic</i>
KK	120	0,052	0,799	0,17165	0,011004	0,120543
BM	120	0,085	0,365	0,22380	0,005383	0,058969
KK1	120	0,040	0,391	0,11746	0,005315	0,058224
Valid N ( <i>listwise</i> )	120					

Berdasarkan hasil statistic deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa nilai kemandirian keuangan memiliki nilai terendah 0,52 dan nilai tertinggi 0,799 dengan nilai rata-rata 0,17165 serta nilai standar deviasi 0,011004. Belanja modal memiliki nilai terendah 0,085, nilai tertinggi 0,365 dengan nilai rata-rata 0,22380 dan standar deviasi 0,058969. Kinerja Keuangan memiliki nilai

minimum sebesar 0,040 nilai maximum sebesar 0,391, nilai rata-rata sebesar 0,11746 dan nilai standar deviasi 0,058224.

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan pada uji normalitas dengan pendekatan Kolmogorov Smirnov Test diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Uji Normalitas

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		120
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	0,01098097
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,061
	<i>Positive</i>	0,061
	<i>Negative</i>	-0,037
<i>Test Statistic</i>		0,061
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,200 <sup>c,d</sup>

Dari hasil output di atas dilihat bahwa nilai KS sebesar 0,061 dan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 dengan level Significant sebesar 5% sehingga dapat kesimpulan bahwa data terdistribusi normal.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikoloniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji asumsi multikoloniearitas dapat dilakukan dengan menghitung nilai toleransi dan nilai VIF (Variance Inflating Factor). Jika nilai tolerance >0.10 dan VIF <10, maka dapat di simpulkan tidak terdapat multikoloniearitas, begitu juga sebaliknya yaitu nilai tiplerance <0,10 dan VIF >10, maka dapat disimpulkan terdapat multikoloniearitas. Hasil penelitian yang baik menunjukkan tidak terjadi multikoloniearitas pada hasil penelitian. Hasil uji asumsi multikoloniearitas pada penelitian ini terjadi pada tabel berikut.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>					
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Collinearity Statistics</i>

		B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,025	0,004		5,741	0,000	
	KK	0,476	0,008	0,985	56,273	0,000	0,992
	BM	0,048	0,017	0,048	2,756	0,007	0,992

a. Dependent Variable: KK1

Output di atas mengatakan bahwa variabel independen tidak memiliki korelasi dengan variabel independen lainnya, hal ini bisa dilihat dari tabel coefficients memiliki nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10 yaitu Kemandirian Keuangan memiliki nilai tolerance sebesar 0,992 dan nilai VIF sebesar 1,008. Belanja modal memiliki nilai tolerance sebesar 0,992 dan nilai VIF sebesar 1,008. Sehingga diasumsikan data dalam pengujian ini tidak terkena multikolinearitas.

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi atau korelasi yang terjadi antara residual pada saat pengamatan lain pada model regresi. Penelitian ini menggunakan alat uji autokorelasi yaitu uji Run-test. Uji Run-test adalah bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Berikut adalah hasil uji Run-test untuk data pada penelitian ini.

Table 4. Uji Autokorelasi

<i>Runs Test</i>	
<i>Unstandardized Residual</i>	
<i>Test Value<sup>a</sup></i>	-0,00051
<i>Cases &lt; Test Value</i>	60
<i>Cases &gt;= Test Value</i>	60
<i>Total Cases</i>	120
<i>Number of Runs</i>	53
<i>Z</i>	-1,467
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,142

Hasil pengujian di atas dapat diasumsikan bahwa tidak ada autokorelasi pada pengujian ini dapat dilihat dari significant sebesar  $0,142 > 5\%$ .

### 4. Uji Heteroskedastiisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode Glesjer. Uji glesjer dilakukan dengan cara meregresi nilai absolut residual dari model yang diestimasi terhadap variabel independen. Adapun kriteria dalam uji ini yaitu apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak ada heteroskedastisitas antara variabel independen terhadap nilai absolut residual. Berikut adalah tabel hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 5. Uji Heteroskedastiisitas

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
		<i>Unstandardized</i>				
		<i>Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	,082	,019		4,354	,000
	KK	,009	,007	,113	1,228	,222
	BM	-,034	,060	-,052	-,567	,572

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Berdasarkan hasil dari output di atas nilai significant untuk constant sebesar 0,000. Kemandirian keuangan sebesar 0,222. Belanja modal sebesar 0,72. dapat disimpulkan bahwa nilai sig > 5% maka data tersebut tidak terkena heteroskedastisitas.

### 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
		<i>Unstandardized</i>				
		<i>Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	0,025	0,004		5,741	0,000
	KK	0,476	0,008	0,985	56,273	0,000
	BM	0,048	0,017	0,048	2,756	0,007

$$KK1 = 0,025 + 0,476 + 0,048 + e$$

Persamaan regresi di atas dapat diketahui angka koefisien menunjukkan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 0,025 menyatakan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan maka kinerja keuangan adalah 0,025.
- 2) Koefisien kemandirian keuangan (X1) mempunyai hubungan positif dengan kinerja keuangan yaitu sebesar 0,476 yang berarti jika terdapat kenaikan 1% kemandirian keuangan akan menaikkan kinerja keuangan sebesar 0,476.
- 3) Koefisien belanja modal (X2) mempunyai hubungan positif dengan kinerja keuangan yaitu sebesar 0,048 yang berarti jika terdapat kenaikan 1% belanja modal akan menaikkan kinerja keuangan sebesar 0,048.

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda Moderasi

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
		<i>Unstandardized</i>		<i>Standardized</i>		
		<i>Coefficients</i>		<i>Coefficients</i>		
Model		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
1	(Constant)	0,120	0,006		20,327	0,000
	Moderasi 1	4,919	0,372	0,897	13,213	0,000
	Moderasi 2	-3,640	0,443	-0,557	-8,209	0,000

$$KK1 = 0,120 + 4,919 + (-3,640) + e$$

- 1) Konstanta sebesar 0,120 menyatakan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan maka kinerja keuangan adalah 0,120.
- 2) Koefisien reputasi model moderasi X1 mempunyai hubungan positif dengan kinerja keuangan yaitu sebesar 4,919 yang berarti jika terdapat kenaikan 1% kemandirian keuangan akan menaikkan kinerja keuangan sebesar 4,919.
- 3) Koefisien reputasi model moderasi X2 mempunyai hubungan negatif dengan kinerja keuangan yaitu sebesar -3,640 yang berarti jika terdapat kenaikan 1% reputasi belanja modal akan menurunkan kinerja keuangan sebesar -3,640.

#### D. PEMBAHASAN

##### **Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis 1 yang diajukan diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Kemandirian Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka kinerja

keuangan pemerintah daerah semakin meningkat. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapakan transfer dana dari pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman.

Penelitian ini sesuai dengan teori *goal setting* dimana teori ini menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja (kinerja), yang diikuti dengan kemampuan dan keterampilan kerja. Dengan pendekatan *goal setting theory*, laporan keuangan pemerintah daerah diasumsikan sebagai tujuan pemerintah daerah, sedangkan variabel kemandirian keuangan adalah sebagai faktor penentu. faktor-faktor ini sangat baik diterapkan di instansi sehingga tujuan kemandirian keuangan pemerintah daerah tercapai.

Kemandirian keuangan juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Semakin tinggi PAD maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi, semakin mandiri suatu daerah, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan daerah tersebut mampu mengelola sumber daya dan potensi-potensi daerahnya secara ekonomis.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori pertumbuhan Neo-Klasik memiliki yang menyebutkan bahwa “semakin besar nilai stok modal per kapita semakin tinggi pendapatan per kapita atau tingkat pertumbuhan ekonomi”, dalam kemandirian keuangan, pemerintah daerah akan berusaha maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini memotivasi Pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah baik pajak daerah maupun retribusi daerah sehingga pendapatan asli daerah (PAD) meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi Kemandirian keuangan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Anynda dan Hermendo, (2021) mengungkapkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

### **Belanja Modal berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.**

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan sebagai investasi untuk meningkatkan penerimaan daerah. Hasil penelitian membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa kenyataan Pemerintah Daerah dengan semakin meningkatnya belanja modal, maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya dapat terjadi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori *Goal setting*, menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja (kinerja), yang diikuti dengan kemampuan dan keterampilan kerja. Dengan pendekatan *goal setting theory*, laporan keuangan pemerintah daerah diasumsikan sebagai tujuan pemerintah daerah, sedangkan variabel belanja modal adalah sebagai faktor penentu. Jika faktor-faktor ini secara baik diterapkan di instansi maka tujuan pemerintah daerah akan tercapai.

Dalam penelitian ini belanja modal yang dialokasikan pemerintah mampu menarik motivasi publik untuk berkontribusi dalam pembangunan. Hasil ini menunjukkan bahwa kenyataan Pemerintah Daerah dengan semakin meningkatnya alokasi belanja modal, maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya dapat terjadi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan. Hal ini yang menyebabkan belanja modal secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Tahir dkk., (2019) yang membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kota Makassar. Andirfa dkk., (2016) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten atau kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Badjra dkk., (2017), Sari dkk., (2020), dan Amrozi, (2016) yaitu belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

### **Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Kinerja Keuangan.**

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat pengaruh kemandirian keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil signifikansi sebesar 0,000 yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi kemandirian keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah. dalam goal setting theory atau teori penetapan tujuan mempunyai empat mekanisme dalam memotivasi individu untuk mencapai kinerja. Pertama, penetapan tujuan dapat mengarahkan perhatian individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Kedua, tujuan dapat membantu mengatur usaha yang diberikan oleh individu untuk mencapai tujuan. Ketiga, adanya tujuan dapat meningkatkan ketekunan individu dalam mencapai tujuan tersebut. Keempat, tujuan membantu individu untuk menetapkan strategi dan melakukan tindakan sesuai yang direncanakan. Dengan demikian, dengan adanya penetapan tujuan dapat meningkatkan kinerja individu yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Hal ini mengandung makna bahwa aktivitas berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan perekonomian pemerintah daerah Kabupaten atau Kota Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 tahun terakhir memberi pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dalam pemerintahan maupun pembangunan Kabupaten atau Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya peningkatan maupun penurunan nilai perekonomian Kabupaten atau Kota dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir mampu mengurangi tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerahnya terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Hasil interaksi antara kemandirian keuangan dan pertumbuhan ekonomi bertanda positif dan signifikan menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi bersifat quasi moderasi (moderasi semu) artinya variabel pertumbuhan ekonomi selain sebagai variabel moderasi juga sebagai prediktor. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Nur'ainy dkk., (2013) pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kota di Jawa Barat. Ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Disisi lain, temuan hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Tolosang, (2018) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan Kota Tomohon.

#### **Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan.**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis 4 yang diajukan ditolak. Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yakni modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Dari teori pertumbuhan ekonomi diatas, sehingga dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) setiap kabupaten/kota yang selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah tetapi juga kondisi sosial politik di daerah.

Penelitian yang dilakukan Sari dkk., (2017) pertumbuhan ekonomi (PDRB) tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten atau kota Bali. Nurzen, (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/ kota Jawa Timur. Hasil ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Aryani dan Hari, (2019) pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten atau kota Sumatera Selatan. Wertianti dan Dwirandra, (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten Kota Provinsi Bali.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai pengaruh kemandirian keuangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Terdapat pengaruh antara kemandirian keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Adanya pengaruh positif antara kemandirian keuangan terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai kemandirian keuangan maka akan semakin meningkatkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Adanya pengaruh antara belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Adanya pengaruh positif antara belanja modal terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai belanja modal maka akan semakin membantu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengaruh kemandirian keuangan terhadap kinerja keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Interaksi antara kemandirian keuangan dan pertumbuhan ekonomi bertanda positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah dan hal ini mengandung makna bahwa aktivitas berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan perekonomian pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 tahun terakhir memberi pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dalam pemerintahan maupun pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan. Interaksi antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi bertanda negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) setiap kabupaten/kota yang selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah tetapi juga kondisi sosial politik di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrozi, A. I. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 1(1): 1–12.
- Andirfa, M., Basri, H., dan Majid, M. S. A. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(3): 30–38.
- Antari, N. P. G. S., dan Sedana, I. B. P. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2): 1080–1110.
- Anynda, N. S., dan Hermendo, S. B. 2021. Pengaruh kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan riset akuntansi*, 9(10): 1–20.
- Aryani, P. R., dan Hari, K. K. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(2): 84–97.
- Badjra, I. B., Mustanda, I. K., dan Abundandt, N. 2017. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1): 29–40.
- Badrudin, dan Rudy. 2012. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Darwanis, D., dan Saputra, R. 2014. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1(2): 183–199.
- Fernandes, J., dan Putri, S. 2022. Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah pada 19 kabupaten/kota provinsi sumatera barat tahun 2017-2020. *Jurnal Revenue*, 3(1): 198–209.
- Holung, R. L., Kawung, G. M. V., dan Tumangkeng, S. 2021. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(1): 869–877.
- Leki, Y., T., N. A., dan I., S. J. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5): 164–174.
- Mahardika, I. G. N. S., dan Artini, L. G. S. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 3(3): 733–749.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STIM YKPN.
- Mulyani, S., dan Wibowo, H. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen*, 15(2): 35–43.
- Nugroho, F., dan Rohman, A. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1(2): 1–14.

- Nur'ainy, R., Desfitriana, dan Utomo, R. B. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 5(7): 8–9.
- Nurzen, M. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(4): 1–16.
- Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2005). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Sari, D. G. Y. A., Kepramareni, P., dan Novitasari, N. L. G. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali. *Jurnal Krisna*, 9(1): 15–29.
- Sari, N. M. D. P., dan Mustanda, I. K. 2019. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 8(8): 4759–4787.
- Sari, N., Nainggolan, B. R. M., Purba, R. A., Saragih, T. B., dan Banjarnahor, W. 2020. Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(1): 219–223.
- Suci, S. C., dan Asmara, A. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 3(1): 8–22.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, I., Mas'ud, M., dan Plyriadi, A. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. *Jurnal Riset Bisnis*, 93(1): 66–74.
- Tolosang, K. D. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3): 79–92.
- Wardani, P. R. O., dan Sutrisna, I. K. 2019. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan IPM Di Kawasan Metropolitan Sarbagita. *E-Jurnal EP Unud*, 8(6): 1361–1389.
- Wertianti, I. G. A. G., dan Dwirandra, A. A. N. B. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(3): 567–584.